

ANALISIS KESELARASAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016-2021

Akbar Alfa

SDGs Center, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan
Received : 21 Maret 2019 ; Accepted : 27 Maret 2019

Email: alfa.boyoune@gmail.com (korespondensi)

Abstract

This SDGs Data Mapping exercise helps us to estimate readiness of Rokan Hulu in applying proposed SDGs indicators to measure SDGs targets; for which indicator data improvement is required and where the data gaps exist. SDGs consist of 17 goals, 169 targets and 241 Indicators (222 Indicator for District). In order to be able to measure the achievements of the SDGs targets, set of indicators are required and data needs to be available to apply those indicators. The exercise was conducted through desk review method by mapping for each SDGs Target existing relevant indicators used or proposed in the local documents: Rokan Hulu Medium- Term Development Plan 2016 - 2021(RPJMD) and others relevant documents as required. The indicators mapping then followed by data mapping for each indicator based on the availability and quality of data from Statistics Agency (BPS) and line Agencies. The indicators mapping showed 8,11% Similiar and 10,36% Proxy.

Keywords: SDGs, Mapping, goals, targets dan Indicators

1. PENDAHULUAN

Bertempat di Markas Besar PBB, pada tahun 2015 para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan yang berkelanjutan, meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Komitmen tersebut diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan

dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Tekad dan komitmen Kabupaten Rokan

Hulu tidak untuk menjadi terdepan dan percontohan terhadap Kabupaten lain dalam pelaksanaan TPB/SDGs sebagai upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan yang di dukung oleh United Nation Development Programme (UNDP). Untuk dapat mengukur pencapaian dari Target SDGs, diperlukan perangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan indikator tersebut untuk dapat dipergunakan. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kerangka hasil (result frame work) yang terdiri dari sasaran dan indikator TPB/SDGs.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi

Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuantujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (Means of Implementation). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 319 Indikator (Metadatas September 2017) yang tercakup menjadi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola secara terintegrasi, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim

14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

2.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maksudnya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian.

Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di

antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

2.3. Visi Misi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Rokan Hulu yaitu " Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya"

Misi Kabupaten Rokan Hulu 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang sejahtera, agamis harmonis dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat;
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan;
- 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka

bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan;

- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
- 5) Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

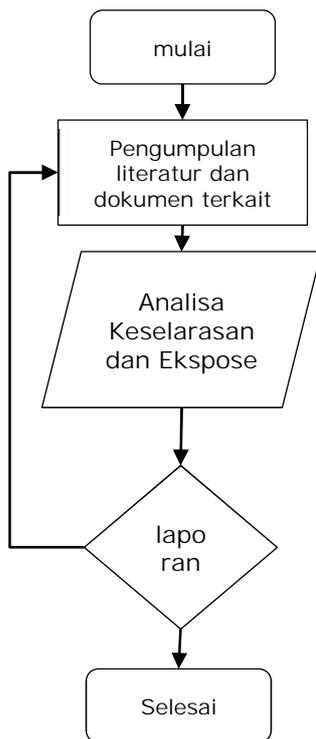
3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Beberapa konsep yang diambil dari berbagai literatur terkait di analisa keselarasannya terhadap topik yang dibahas.

Pemetaan terhadap kesesuaian antara TPB/SDGs dan Indikator pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan metode desk review, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang tertulis dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan ditopang dengan data-data sekunder berupa peraturan perundang – undangan tentang perencanaan daerah, Peraturan Daerah (Perda) , laporan data statistik Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau, laporan pemetaan di masing – masing instansi terkait, dokumen perencanaan, instansi di Kabupaten Rokan Hulu, buku – buku dan jurnal yang relevan.

Dalam penelitian awal ini data sekunder yang digunakan sebagai obyek studi adalah RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2016 – 2021 dan dokumen Rencana aksi nasional TPB/SDGs. Untuk memperkuat hasil pemetaan, maka dilakukan rapat pembahasan indikator dengan stakeholder

Tahapan penelitian menggunakan tahapan sederhana dimana setelah literatur dan dokumen terkait didapat, maka diadakan analisis keselarasan antara dokumen yang didapat tersebut.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

4. ANALISIS

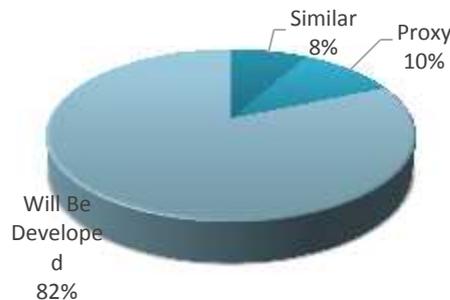
Berdasarkan hasil desk review kajian ini, Kabupaten Rokan Hulu secara prinsip telah mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan RPJMD. Adapun temuan pada desk review ini sebagai berikut:

- Pilar sosial untuk indikator similar adalah 5,86%, proxy 5,86% dan will be developed 33,33%
- Pilar Ekonomi untuk indikator similar adalah 1,35%, proxy 2,25% dan will be developed 17,57%
- Pilar Lingkungan untuk indikator similar adalah 0,45%, proxy 1,35% dan will be developed 18,02%
- Pilar Hukum dan Tata Kelola untuk indikator similar adalah 0,45%, proxy 0,90% dan will be developed 12,61%
- Secara keseluruhan untuk indikator similar sebesar 8,11% atau 18 indikator, proxy sebesar 10,36% atau 23 indikator dan selebihnya will be developed sebesar 81,53% atau 182 indikator.



Gambar 2. Grafik Perbandingan berdasarkan masing-masing pilar.

Dari perbandingan indikator tersebut diatas dapat disederhanakan yaitu indikator similar sebanyak 8,11% (18 indikator), indikator Proxy sebanyak 10,36% (23 Indikator).



Gambar 3. Grafik Perbandingan antar indikator

5. KESIMPULAN

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil analisa keselarasan terhadap Revisi RPJMD Kabupaten Rokan Hulu terdapat 18 Indikator Similar atau setara dengan 8,11%, 23 Indikator Proxy atau setara dengan 10,36% dan 181 Indikator will be developed atau setara dengan 81,53%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Alfa, Industri Konstruksi di Era Industri 4.0, Jurnal Selodang Mayang, Vol 4, No. 3, 2018.
- [2] Afrida dan I. Basyari, Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021, Jurnal Selodang Mayang, Vol 4, No. 3, 2018

- [3] Bappenas RI, Rencana Aksi Nasional SDGs Republik Indonesia 2016 – 2019 . [Dokumen Negara], 2016
- [4] Bappeda kabupaten Indragiri Hilir, Rencana Pembangunan Jangka Menedangah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021, 2016
- [5] Ishotono dan S.T. Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Penanggulangan Kemiskinan, SHARE Social Work Journal, Vol. 6, No. 2, 2016
- [6] R.Z. Surya. Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Selodang Mayang, Vol 4 , No. 1, 2018
- [7] UNDP dan UNEP, Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets. Case of Indonesia [Report], 2015

Lampiran Indikator Selaras

No	Kode Indikator	INDIKATOR SDGS/TPB	INDIKATOR KABUPATEN ROKAN HULU
GOAL 1 - Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun			
1	1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Penduduk Miskin
2	1.4.1(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	APM SD/MI
3	1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	APM SMP/MTs
GOAL 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
1	2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi kurang gizi pada anak balita
2	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan / tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi kurang gizi pada anak balita
3	2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH & Jumlah konsumsi protein hewani asal ikan
GOAL 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 KH)
2	3.2.2(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1.000 KH)
3	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
4	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Jumlah annual parasite incidence (API) Malaria <1 per 1.000 penduduk
GOAL 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia			
1	4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	APK SD/MI
2	4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	APK SMP/MTs
GOAL 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan			
1	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
GOAL 6 - Menjamin ketersediaan serta Pengembaganelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua			
1	6.2.1.(c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM
GOAL 8 - Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua			
1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	Pertumbuhan PDRB (%)
2	8.1.1(a)	PDB per kapita	PDRB Per Kapita (Rp.juta)
GOAL 10 - Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara			

No	Kode	INDIKATOR SDGS/TPB	INDIKATOR KABUPATEN ROKAN
1	10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Persentase Penduduk Miskin (%)
GOAL 16 - Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan			
1	16.6.1(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah

Lampiran Indikator Proxy

No	Kode Indikator	INDIKATOR SDGS/TPB	INDIKATOR KABUPATEN ROKAN HULU
GOAL 1 - Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun			
1	1.3.1(c)	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya dan inklusivitas	Jumlah pelayanan bagi penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
2	1.3.1(d)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima jaminan sosial
3	1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
4	1.4.1(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran
GOAL 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
1	3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Persentase penderita kusta selesai berobat > 90 %
2	3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)	Angka kesakitan filariasis progrese
3	3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Jumlah kelompok binaan PIK remaja dalam penanggulangan narkoba di sekolah
4	3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur
GOAL 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia			
1	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase sekolah yang terakreditasi: SD/MI
2	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase sekolah yang terakreditasi: SMP/MTs
3	4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Angka harapan lama sekolah
4	4.c.1 *	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Jumlah guru bersertifikasi
GOAL 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan			
1	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
GOAL 6 - Menjamin ketersediaan serta Pengembaganelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua			
1	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Jumlah unit pengolahan air bersih
GOAL 8 - Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua			
1	8.5.1.*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rasio upah minimum kabupaten terhadap upah minimum pemerintah

No	Kode	INDIKATOR SDGS/TPB	INDIKATOR KABUPATEN
2	8.5.2.*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka pengangguran usia produktif (orang)
3	8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan
GOAL 11 - Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
1	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Jumlah pembangunan rumah layak huni
GOAL 12 - Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
1	12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pengelolaan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun)
GOAL 16 - Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif Di Semua Tingkatan			
1	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran
2	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
GOAL 17 - Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan			
1	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
2	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah

Lampiran Proporsi Per-Indikator

No	Pilar	Goal	Indikator	Proporsi Per Indikator					
				Similar	Persen (%)	Proxy	Persen (%)	Will Be Developed	Persen (%)
A	Sosial	1. Tanpa Kemiskinan	26	3	1,35	4	1,80	19	8,56
		2. Tanpa Kelaparan	12	3	1,35	0	0,00	9	4,05
		3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	36	4	1,80	4	1,80	28	12,61
		4. Pendidikan Berkualitas	13	2	0,90	4	1,80	7	3,15
		5. Kesetaraan Gender	13	1	0,45	1	0,45	11	4,95
		Sub Total	100	13	5,86	13	5,86	74	33,33
B	Ekonomi	7. Energi Bersih & Terjangkau	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	14	2	0,90	3	1,35	9	4,05
		9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur	10	0	0,00	0	0,00	10	4,50
		10. Berkurangnya Kesenjangan	10	1	0,45	0	0,00	9	4,05
		17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	13	0	0,00	2	0,90	11	4,95
		Sub Total	47	3	1,35	5	2,25	39	17,57
C	Lingkungan	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	19	1	0,45	1	0,45	17	7,66
		11. Kota & Permukiman yang Berkelanjutan	14	0	0,00	1	0,45	13	5,86
		12. Konsumsi & Produksi Bertanggungjawab	5	0	0,00	1	0,45	4	1,80
		13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0,00	0	0,00	2	0,90
		14. Ekosistem Lautan	1	0	0,00	0	0,00	1	0,45
		15. Ekosistem Daratan	3	0	0,00	0	0,00	3	1,35
		Sub Total	44	1	0,45	3	1,35	40	18,02
D	Hukum dan Tata kelola	16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	31	1	0,45	2	0,90	28	12,61
		Sub Total	31	1	0,45	2	0,90	28	12,61
Total			222	18	8,11	23	10,36	181	81,53